

# PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SIKOPROL DI DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG

Fepi Febianti\*<sup>1</sup>, Anisa Novianty Dwi Kania<sup>2</sup>, Evi Fatimus Sadiyah<sup>3</sup>, Iham Ramadhan<sup>4</sup>,  
Nita Purnama<sup>5</sup>, Sandi Cahyadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Sebelas April

## Article Info

### Article history:

Received June 07, 2023

Revised June 10, 2023

Accepted June 10, 2023

### Keywords:

Public Administration

Management

Controlling

Implementation of Public Policy

## ABSTRACT

Information technology really helps a person, business entity or legal entity in carrying out their work and duties more quickly and easily. One legal entity that uses information technology to support the needs of carrying out its duties is Bidang Koperasi in Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian of Sumedang Regency by creating an application called SIKOPROL. The implementation of the Sikoprol application can affect Cooperative supervision so that the process of achieving Organizational goals can be achieved properly. The purpose of this study was to determine the implementation of the SIKOPROL application and controlling of Koperasi, to determine the relationship between the Implementation of the SIKOPROL Application and Controlling of Cooperatives and to determine the effect of the Implementation of the SIKOPROL Application on Supervision of Cooperatives in Bidang Koperasi in Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian of Sumedang Regency. This research uses descriptive analysis method with a quantitative approach and the types of statistics used are descriptive statistics with saturated sampling techniques. The number of samples studied were 15 respondents. The analysis used includes validity test, reliability test, normality test, percentage calculation, correlation coefficient test, significance test and coefficient of determination test. Based on the research results, it is known that the implementation of the SIKOPROL application. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian ini Sumedang Regency is already in good criteria with analysis results reaching 90.67%. Likewise, Controlling of Koperasi is in good criteria with the results of the analysis reaching 86.67%. From the correlation analysis, it was obtained a correlation value of 0.676 which indicates a positive and significant relationship between the implementation of the SIKOPROL application and Controlling of Koperasi. From the analysis of the coefficient of determination it is known that the SIKOPROL Implementation variable has an influence on Cooperative controlling of 48.5%. The remaining 52.5% is influenced by other factors not examined in this study.



Copyright © 2022 JRPA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Fepi Febianti

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No.19 Sumedang

Email: [fepi\\_febianti@unsap.ac.id](mailto:fepi_febianti@unsap.ac.id)

## 1. INTRODUCTION

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Teknologi juga memiliki manfaat dalam bidang administrasi yaitu sangat membantu dalam penyimpanan, pengelompokan dan pengolahan data. Oleh karena itu, dewasa ini banyak lembaga/instansi pemerintahan dan badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menjalankan tugas dan kegiatannya, salah satunya adalah Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil berimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, dimulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan adanya pandemi secara tidak langsung memaksa kita untuk melakukan transformasi digital dengan lebih cepat dari yang semestinya. Untuk menyikapi hal tersebut, Koperasi yang bekerjasama dengan PT. USSI turut mengikuti transformasi digital dengan menciptakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Koperasi Online (SIKOPROL). Aplikasi tersebut dibuat untuk mewujudkan data dan informasi koperasi yang cepat, akurat, berkualitas dan terintegrasi. Aplikasi tersebut juga merupakan suatu sistem informasi yang menyajikan data koperasi, kesehatan koperasi, dan keragaan koperasi.

Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan kewajiban pelopran usaha koperasi kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian baik informasi pengurus maupun informasi anggota. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pembinaan dan pengawasan kelembagaan Koperasi dan UKM serta memungkinkan penyesuaian program dan kebijakan yang lebih aplikatif pada koperasi dan UKM.

Dalam mengimplementasikan layanan SIKOPROL ini diperlukan pengawasan kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Pengawasan dijelaskan oleh Koontz dalam Silalahi (2009) merupakan pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana. Adapun menurut Siagian (2004) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kinerja Dinas yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian diperlukan pengawasan didalam mengimplementasikan program SIKOPROL di Kabupaten Sumedang.

Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi dari suatu kebijakan ataupun program. Hasil penelitian Carminah (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 61.46% antara pengawasan dengan implementasi kebijakan. Demikian pula hasil penelitian Sitorus (2014) menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh secara langsung kepada implementasi kebijakan sebesar 75,58%.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap implementasi SIKOPROL di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap implementasi SIKOPROL di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

## 2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang mana datanya penelitiannya berupa angka-angka analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). populasi penelitian sebanyak 15 orang yang merupakan pegawai bidang koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Sumedang. Dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 orang maka teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2017). Dengan demikian jumlah responden sebanyak 15 orang pegawai bidang koperasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk studi lapangan dilakukan melalui observasi dan kuesioner. Untuk analisis data menggunakan perhitungan prosentase, uji normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov Test, Uji Koefisien korelasi menggunakan *pearson product moment*, uji signifikansi menggunakan uji t, dan uji koefisien determinasi.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### Kondisi Pengawasan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil perhitungan prosentase terhadap pengawasai di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Sumedang, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Perhitungan Prosentase Implementasi SIKOPROL di Kabupaten Sumedang

No.	Pernyataan	Prosentase
1	Pimpinan memeriksa kebenaran dari setiap laporan	81.33%
2	Pimpinan memeriksa kebenaran dari setiap pernyataan pegawai	82.67%
3	Terdapat Standar Operasional Prosedur yang rasional dan objektif	82.67%
4	Pimpinan memonitoring secara langsung pegawai Ketika melakukan pengawasan di lapangan	81.33%
5	Pimpinan memantau setiap perubahan pada setiap proses kegiatan pengawasan	81.33%
6	Pimpinan melakukan evaluasi kerja yang dilakukan secara berkelanjutan	84.00%
7	Pimpinan Mengevaluasi perencanaan kegiatan yang akan dilakukan	82.67%
8	Pimpinan mengevaluasi kondisi dan kemajuan dari suatu kegiatan.	84.00%
9	Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan	81.33%
10	Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan	82.67%
11	Pimpinan tidak hanya menilai kinerja saja, melainkan juga menilai penampilan dan sikap pegawai	84.00%
12	Pimpinan melakukan pengawasan langsung terhadap pegawai	82.67%
13	Pimpinan menganalisis setiap data pekerjaan pegawai	82.67%
14	Pimpinan melakukan pemeriksaan pengarahan terhadap hasil kerja pegawai	82.67%
15	Pimpinan memberikan motivasi dan saran-saran terhadap pegawai	86.67%
16	Pimpinan melakukan seleksi pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilannya	81.33%
17	Pegawai menerima hadiah/ penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik	78.67%
18	Pimpinan memberikan kepercayaan pada setiap pegawai	85.33%
19	Pimpinan memberikan tanggung jawabnya pada setiap kegiatan dan keputusan	84.00%
20	Pimpinan memberikan solusi Tindakan terhadap setiap permasalahan	84.00%

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa item dari variabel pengawasan yang memiliki nilai prosentase tertinggi adalah item No 15 yaitu pimpinan memberikan motivasi dan saran-saran terhadap pegawai sebesar 86,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan bidang koperasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan online SIKOPROL melalui pemberian pengarahan. Bentuk pengarahan yang dilakukan tidak hanya melakukan pemeriksaan hasil kerja melainkan memberika pula motivasi dan saran-saran terhadap pegawai dalam mengimplementasikan layanan online SIKOPROL.

Sedangkan item dengan nilai terendah adalah item nomor 17 sebesar 78,67% yaitu item pegawai menerima hadiah/penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik. Nilai prosentase tersebut menunjukkan bahwa belum adanya penghargaan secara kontinyu yang diberikan organisasi maupun pimpinan kepada pegawai yang berprestasi dalam bekerja.

Selama ini, organisasi maupun pimpinan bidang koperasi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan online SIKOPROL namun pengawasan yang diberikan belum berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak hal-hal atau aspek-aspek dalam pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Seperti halnya melaksanakan monitoring secara langsung pelayanan online SIKOPROL,

melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan online SIKOPROL, dan memantau perubahan secara berkala terhadap aplikasi maupun pelayanan online SIKOPROL.

Pengawasan terhadap pekerjaan tentunya sangatlah diperlukan untuk menilai kinerja pegawai maupun pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari diadakannya pengawasan menurut Husnaini (2001) terdiri dari:

1. Menghentikan atau penyelewengan, pemborosan, dan hambatan;
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan; dan
3. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Adapun fungsi dari pengawasan dijelaskan oleh Erni dan Saefulah (2005) terdiri dari:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
2. Mengambil langkah klasifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan; dan
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan usaha.

### **Kondisi Implementasi SIKOPROL di Kabupaten Sumedang**

Berdasarkan hasil perhitungan prosentase terhadap implementasi SIKOPROL di Kabupaten Sumedang, diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan Prosentase Implementasi SIKOPROL di Kabupaten Sumedang

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Prosentase</b>
1	Pelaksanaan kebijakan SIKOPROL telah dilakukan sesuai sasaran dan tujuan SIKOPROL	86.67%
2	Bahasa atau komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi mengenai SIKOPROL sudah jelas	84%
3	Tingkat pemahaman terhadap penggunaan SIKOPROL	76%
4	Penyebaran Informasi mengenai SIKOPROL disampaikan oleh pimpinan bidang koperasi.	73.33%
5	Tersedianya pedoman tata cara penggunaan SIKOPROL	78.67%
6	Adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan SIKOPROL	90.67%
7	Adanya dukungan dan ketersediaan dana dalam pelaksanaan SIKOPROL	88%
8	Pemerintah atau Instansi terkait memberikan bantuan khusus baik materi maupun non materi dalam melaksanakan kebijakan SIKOPROL	73.33%
9	Ketersediaan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan SIKOPROL	69.33%
10	Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompentensi dan memiliki keahlian teknis	65.33%
11	Unit-unit koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang telah mengakses Aplikasi SIKOPROL	76%
12	Pegawai telah mematuhi peraturan atau pedoman penggunaan SIKOPROL	77.33%
13	Pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan tugas yang diembannya	77.33%
14	Pengiriman laporan keuangan tepatwaktu	77.33%
15	Pegawai berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam penggunaan aplikasi SIKOPROL	84%
16	Pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab pekerjaan	84%
17	Ketersediaan SOP dalam pelaksanaan SIKOPROL	84%
18	Kejelasan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan SIKOPROL	82,67%
19	Ketersediaan Job Description di bidang koperasi	74,67%
20	Ketersediaan tim khusus di bidang operator	61,33%

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa item dari variabel implementasi SIKOPROL yang memiliki nilai prosentase tertinggi adalah item No 6 yaitu adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan SIKOPROL sebesar 90,67%. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan tidak terkecuali implementasi SIKOPROL. Subarsono (2011) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu dimensi didalam implementasi kebijakan. Apabila kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya manusia yang diperlukan sebagai implementor adalah pegawai yang memiliki kompetensi ataupun kemampuan dalam bekerja. Dalam menjalankan kebijakan diperlukan staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik (Winarno, 2014).

Oleh karena itu, guna meningkatkan kompetensi kerja pegawai diperlukan pemberian pelatihan kepada pegawai. Pelatihan sendiri merupakan serangkaian aktivitas individu-individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya (Widodo, 2015). Sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja khususnya selaku implementor kebijakan. Keikutsertaan pegawai bidang koperasi dalam pelatihan terkait layanan SIKOPROL diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan kerja pegawai dan tentunya dapat memperbaiki kinerja dari para pegawai bidang koperasi tersebut. Lebih lanjut Carrel dalam Salinding (2011) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pelatihan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja;
2. Meningkatkan keterampilan pegawai;
3. Menghindari keusangan manajerial;
4. Memecahkan permasalahan;
5. Orientasi pegawai baru;
6. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial; dan
7. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel.

Selanjutnya, perhitungan prosentase dengan nilai terendah yaitu sebesar 61,33% adalah item Nomor 20 dengan indikator ketersediaan tim khusus di bidang operator. Kondisi di lapangan menggambarkan bahwa tidak adanya pegawai khusus yang berikan pekerjaan sebagai operator SIKOPROL sehingga tidak ada yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pengawasan data master yang terdapat pada layanan tersebut. Semua pegawai di Bidang Koperasi dapat mengakses data master pada layanan SIKOPROL selama diberikan tugas oleh pimpinan bidang/Kepala bidang untuk melakukan pengecekan data laporan koperasi terbaru yang diisikan oleh pengurus koperasi yang telah terdaftar pada layanan SIKOPROL. Dengan kondisi seperti itu dapat berdampak terhadap efisiensi pengawasan implementasi SIKOPROL yang dilakukan oleh petugas Koperasi di Kabupaten Sumedang.

### **Pengaruh Pengawasan Terhadap Implementasi SIKOPROL Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang**

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai pengaruh pengawasan terhadap implementasi SIKOPROL pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Sumedang sebesar 48,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung antara pengawasan dengan implementasi SIKOPROL namun terdapat pula variabel lain yang mempengaruhi implementasi SIKOPROL secara tidak langsung sebesar 51,6% seperti kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan lain-lain.

Implementasi berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan keputusan tersebut terhadap sasaran implementasi. Implementasi merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak lepas dari adanya penerapan *E- Government*. Salah satu Aplikasi *E-Government* yang digunakan adalah Sistem Informasi Koperasi Online (SIKOPROL). SIKOPROL merupakan sistem informasi yang menyajikan data koperasi, kesehatan koperasi dan keragaan koperasi dalam rangka mewujudkan data dan informasi yang cepat, akurat, berkualitas dan terintegrasi.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir serta mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Menurut Manullang (2009) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa implementasi SIKOPROL memiliki keterkaitan dengan Pengawasan. Dimana dengan adanya aplikasi tersebut sangat membantu dalam pengawasan di Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

#### 4. CONCLUSION

Hasil penelitian secara deskriptif terhadap variabel (X) Pengawasan dilihat rata-rata jawaban sudah berada pada kriteria baik yaitu sebesar 86,67% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Nilai tertinggi berada pada dimensi Merekomendasikan yaitu Pimpinan memberikan motivasi dan saran-saran terhadap pegawai., sedangkan nilai terendah berada pada dimensi merekomendasikan juga yaitu Pegawai menerima hadiah/ penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik. Adapun hasil penelitian secara deskriptif terhadap variabel (Y) Implementasi SIKOPROL dilihat rata-rata jawaban sudah berada pada kriteria baik yaitu sebesar 90,67% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Nilai tertinggi berada pada dimensi Sumberdaya yaitu adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan SIKOPROL, sedangkan nilai terendah berada pada dimensi Struktur Birokrasi yaitu kurang tersedianya tim khusus dibidang operator sudah mencukupi. Selain itu, Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan dengan implementasi SIKOPROL pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebesar 48,4%.

#### REFERENCES

- Carminah, Mimin. (2020). Pengaruh Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas April. <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/107>
- Erni, T.S. dan Saefulah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Husnaini. (2001). *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Madha University Press.
- Salinding, Rony. (2011). Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas kerja Karyawan Pada PT. Erajaya Swasembada Cabang Karanganyar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Siagian. (2004). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi. (2009). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sitorus, Monang. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deliserdang. *Jurnal Wacana Kinerja. Vol 17 No 1 (2014)*. <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/234>
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Suparno. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.